

STATUS SOSIAL NON-MUSLIM DI TIMUR TENGAH

Ahmad Naufal Dzulfaroh dan Mumtazah Kamilah

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Abstract: This study aims to find detailed data on non-muslim social status in the Middle East, particularly the social status of Coptic Christian groups in Egypt, Christian Maronites in Lebanon, Christian in Sudan as well as Jewish communities in Egypt, Iraq and Iran. The research method used in this research is descriptive qualitative through literature review. The authors analyzed matters relating to the existence of groups, social and political status of non-muslim communities in the Middle East. As for the results of this analysis is first, non-muslim existence in the Middle East as a whole occupies a position as a minority group. This is due to the long history of the Islamic journey that has captured the entire Middle East region and the diaspora of the non-muslim population to the West. Second, in general, non-muslim groups in the Middle East are able to co-exist well with the majority. However, in certain situations minority groups are often subjected to several acts of terror, such as killing and assaulting houses of worship. Third, judging from the right received by non-muslim groups in the Middle East as citizens, only Sudanese Christian groups, Jewish Communities in Iraq and Iran are received discriminatory treatment. Fourth, politically, only the Egyptian and Christian Copts of Sudan received discriminatory treatment from the government, both political and parliamentary.

Keywords: Social Status, Non-muslim, Middle East

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menemukan data detail mengenai status sosial non-muslim di Timur Tengah, khususnya status sosial dari kelompok Kristen Koptik di Mesir, Kristen Maronit di Lebanon, Kristen di Sudan serta komunitas Yahudi di Mesir, Iraq dan Iran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui kajian pustaka. Penulis menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi kelompok, status sosial dan politik dari komunitas non-muslim di Timur Tengah. Adapun hasil dari analisis ini adalah pertama, eksistensi non-muslim di Timur Tengah secara keseluruhan menempati posisi sebagai kelompok minoritas. Hal ini disebabkan oleh sejarah panjang perjalanan Islam yang berhasil menguasai seluruh wilayah Timur Tengah dan diaspora penduduk non-muslim ke Barat. Kedua, secara umum kelompok non-muslim di Timur Tengah mampu hidup berdampingan dengan baik bersama kelompok mayoritas. Hanya saja, dalam situasi tertentu kelompok minoritas seringkali menjadi sasaran beberapa aksi teror, seperti pembunuhan dan penyerangan rumah ibadah. Ketiga, dilihat dari hak yang diterima oleh kelompok non-muslim di Timur Tengah sebagai warga negara, tercatat hanya kelompok Kristen Sudan, Komunitas Yahudi di Iraq dan Iran yang mendapat perlakuan diskriminatif.

Keempat, secara politik tercatat hanya kelompok Koptik Mesir dan Kristen Sudan yang mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah, baik akses politik maupun porsi di parlemen.

Kata Kunci: Status Sosial, Non-muslim, Timur Tengah

A. PENGANTAR

Seringkali Timur Tengah selalu diidentikkan dengan ‘Arab’ dan ‘Islam’. Maksudnya, semua yang mendiami wilayah Timur Tengah adalah orang Arab yang beragama Islam. Kesalahpahaman inilah yang banyak diyakini oleh masyarakat luas. Secara historis, Semenanjung Arab memang menjadi tempat awal kelahiran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, kita juga harus mengakui bahwa Yahudi dan Kristen pun lahir di Timur Tengah sebelum akhirnya berkembang pesat di Barat di bawah kekaisaran Romawi. Dengan usianya yang relatif lebih muda, kemunculan Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat Arab, bahkan mampu menjadi agama mayoritas di Timur Tengah hingga saat ini. Kendati demikian, eksistensi Yahudi dan Kristen tidak sepenuhnya hilang dan dilarang di bawah kekhalifahan Islam. Sebaliknya, sebagai minoritas yang hidup di bawah kekuasaan Islam, mereka mendapat tempat dan perlakuan yang sama dengan syarat harus membayar *jizyah* (pajak) sebagai kafir *dhimmi*.

Kemesraan antar umat beragama di Timur Tengah juga terlihat di masa penjajahan Barat. Mereka sadar, dengan sentimen keagamaan yang tinggi, mereka tidak akan pernah meraih kemerdekaan dari tangan penjajah. Menanggapi hal itu, Amin Rihani (dalam Barakat, 2012:341) meletakkan istilah *al-‘urubah* (Arabisme) di atas sentimen Islam dan Kristen. Dengan gagasan arabisme tersebut, masyarakat Arab tidak lagi memandang identitas keagamaan sebagai pembeda. Mereka lebih memilih bersatu di bawah bendera yang sama, yaitu bendera bangsa Arab untuk bersatu melawan penjajah. Namun, sejak pendudukan Yahudi di Palestina, hubungan antara Yahudi dan Islam menjadi tegang. Baik di Palestina maupun di

negara Arab lain, semua orang Yahudi seakan menjadi bersama musuh yang harus dijaui tanpa peduli apakah ia terlibat atau tidak. Relasi antara Islam dan Kristen pun demikian, sejak kemunculan kelompok-kelompok fundamentalis Islam, Kristen selalu menjadi objek atau target dalam beberapa aksi yang mereka lakukan. Tentu hal ini berdampak buruk pada masa depan hubungan antar umat Islam dan Kristen di Timur Tengah.

Pembicaraan mengenai status sosial bagi kelompok agama tertentu dalam satu wilayah tidak lepas dari gagasan mayoritas dan minoritas. Kelompok mayoritas atau kelompok dominan dalam suatu masyarakat merupakan kelompok yang merasa memiliki kontrol atau kekuasaan untuk mengontrol. Mereka merupakan sumber daya kekuasaan dalam setting institusi yang berbeda-beda dan berpengaruh pada pemerintahan, pendidikan, agama, dan pekerjaan. Sebaliknya, kelompok minoritas kurang memiliki akses sumber daya dan kekuasaan, bahkan berpeluang untuk tidak mendapatkannya sama sekali (Liliweri, 2005:102). Dari pengertian di atas, istilah mayoritas dan minoritas tidak selamanya mengacu pada segi jumlah (*numerical majority*), tetapi bisa juga disematkan kepada kelompok yang memiliki kekuasaan tertentu dan berpengaruh dalam masyarakat. Suriah, misalnya, memiliki jumlah penduduk Muslim Sunni yang jauh lebih besar daripada kelompok Syi'ah. Akan tetapi, yang memegang kekuasaan negara berasal dari kelompok Syi'ah, kelompok minoritas di Suriah.

Hubungan antara mayoritas dan minoritas agama dapat dilihat melalui dua aspek, yaitu kebijakan negara terhadap mayoritas dan minoritas serta interaksi sosial antara mayoritas dan minoritas. Kebijakan negara, dalam hal ini berkaitan dengan perlakuan negara terhadap hak-hak asasi minoritas agama. Dalam wacana demokrasi, mayoritas dan minoritas seharusnya tidak lagi mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam memenuhi hak warga negaranya. Begitu halnya dengan akses politik yang selama ini banyak diisi oleh kelompok mayoritas. Di Timur Tengah, demokrasi sudah lama dikumandangkan di beberapa negara. Namun, patut kita cermati apakah payung demokrasi yang mereka terapkan selama ini mampu

memberi ruang bagi kelompok minoritas (non-muslim), atau barangkali hanya sebatas demokrasi bagi kepentingan kelompok mayoritas (muslim) semata. Artikel singkat ini berusaha mengkaji status sosial non-muslim, yaitu Kristen dan Yahudi di Timur Tengah.

B. METODE

Cara kerja untuk memahami objek dan menjawab rumusan masalah adalah dengan menggunakan metode. Metode yang digunakan harus tepat dan sesuai dengan karakteristik objek kajian dan sifat penelitiannya. Maka, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh akan dideskripsikan untuk memahami dan mengetahui fenomena dalam penelitian. Metode ini bertujuan untuk memahami makna yang mendasari tingkah laku manusia. Selain itu, metode kualitatif juga digunakan untuk menghasilkan data yang mendalam serta mendapat gambaran yang komprehensif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji sumber data berupa, buku, makalah, artikel, dan hasil-hasil penelitian lain yang masih relevan dengan objek penelitian.

Subjek yang dijadikan data dalam penelitian ini adalah kelompok minoritas agama di negara-negara Timur Tengah, yaitu agama Kristen dan Yahudi. Dalam penelitian ini, penjelasan tidak ditujukan pada setiap negara Timur Tengah, tetapi akan diambil sampel dari beberapa negara, yaitu Mesir, Lebanon, Sudan, Iraq, dan Iran. Pengambilan sampel terhadap kelima negara tersebut didasari atas jumlah pemeluk yang lebih banyak dibandingkan dengan kelompok agama minoritas lainnya dan keterlibatan dalam beberapa peristiwa penting dengan kelompok mayoritas, baik sebagai sekutu maupun oposisi.

C. PEMBAHASAN

1. Kristen di Timur Tengah

a. Kristen Koptik Mesir

Sejarah pernah mencatat bahwa jauh sebelum Islam masuk, Mesir merupakan salah satu wilayah kekuasaan dua imperium besar, yaitu kekaisaran Romawi dan Sasania. Pemeluk Koptik mengklaim dirinya sebagai keturunan Mesir Kuno, meskipun dalam perjalanan sejarah mereka telah bercampur dengan suku-suku lain. Mayoritas penduduk Mesir sepenuhnya memeluk Kristen sejak awal abad Masehi. Namun, sebagian besar dari pemeluknya memisahkan diri dengan Gereja Induk akibat perbedaan ideologi yang mereka yakini. Kelompok ini kemudian membentuk Gereja nasional yang diberi nama dengan Koptik (*Coptic*), oposisi dari 'Melkite' atau Gereja Ortodok Romawi. Karena perbedaan inilah pemeluk Kristen Koptik Mesir banyak mendapat persekusi dari pemerintahan Romawi. Baru setelah Islam mampu merebut kekuasaan dari Romawi di Mesir, mereka mendapat perlakuan yang baik sebagai '*ahl al-dhimmah*' dan memiliki kedudukan yang sama dengan Kristen Ortodok (Hourani, 1947:44).

Perlakuan tersebut membuat banyak pemeluk Koptik masuk Islam, sehingga jumlah mereka terus berkurang. Sebaliknya, Islam semakin berkembang dan menjadi agama mayoritas di Mesir. Umat Koptik hidup berdampingan dengan umat Islam dan mendapatkan tempat istimewa dalam kehidupan sosial masyarakat. Beberapa di antara mereka mampu menjadi seniman, dokter, pramuniaga, pegawai pemerintahan, dan hampir menguasai berbagai aktifitas ekonomi. Di masa dinasti Fathimiyah, umat Islam banyak berhutang budi pada masyarakat Koptik Mesir atas keahlian mereka dalam mengelola ekonomi pertanian sungai Nil dan aspek lain dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, hal ini menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan Muslim. Akibatnya, umat Koptik kembali mengalami persekusi dan tidak mendapatkan jaminan keamanan yang seharusnya menjadi hak setiap individu (Hourani, 1947:45).

Baru ketika Muhammad Ali memerintah Mesir, orang-orang Koptik mendapat angin segar dengan beberapa kebijakan yang tidak merugikan mereka.

Muhammad Ali membebaskan mereka dari beban yang harus mereka penuhi, seperti pembayaran pajak *ahl al-dhimmah (jizyah)*, penghilangan tanda yang membedakan umat Islam dan Koptik, dan mempermudah pembangunan gereja. Tidak hanya itu, Ali juga merangkul umat Koptik agar berpartisipasi dalam membangun pemerintahan Mesir modern (Hamilton dalam Mahmood, 2012:431). Dampak positif dari kebijakan tersebut mulai dirasakan umat Koptik di akhir abad-19, mereka mampu menguasai 25% dari total kekayaan nasional Mesir (Belge dan Ekrem, 2015:286).

Dalam hal kehidupan sosial di Mesir, pemeluk Koptik dan umat Muslim hampir tidak bisa dibedakan. Mereka hidup berdampingan dengan baik, bahkan sulit untuk membedakan antara pemeluk Koptik dan umat Muslim. Sebagian besar pemeluk Koptik hidup menjadi petani di desa-desa sepanjang sungai Nil dengan hasil panen yang sama dan memiliki masalah ekonomi yang sama dengan penduduk lainnya. Hanya sebagaian kecil dari pemeluk Koptik yang memiliki tanah di kota dan menempati kelas sosial yang lebih tinggi. Rata-rata mereka yang hidup di kota bekerja sebagai tukang emas, pemberi pinjaman, agen tanah, dan sebagian kecil mampu bekerja di kantor pemerintahan walaupun sulit bagi mereka untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi (Hourani, 1947:45).

Awal abad ke-20 menjadi momen paling penting bagi sejarah hubungan Koptik dan Muslim di Mesir. Dengan ide-ide nasionalisme dan jaminan perlindungan yang sama di bawah pemerintahan negara modern, umat Koptik dan Muslim yang dipimpin oleh Sa'ad Zaghloul bersatu melawan aturan penjajahan Inggris. Sebelumnya, umat Koptik telah menolak institusionalisasi aturan '*national minority*' oleh pemerintah kolonial yang ditujukan sebagai identitas pemeluk Koptik. Di tahun 1922, Inggris akhirnya mengakui kemerdekaan Mesir dengan syarat yang mereka ajukan, seperti kontrol politik, administrasi, keuangan, dan otoritas Terusan Suez. Menyikapi hal itu, umat Koptik kembali bergabung dengan umat Muslim untuk menolak upaya intervensi Inggris atas pemerintahan Mesir.

Namun, hubungan Koptik-Muslim kembali memanas di tahun 1923, ketika konstitusi pertama Mesir telah dibentuk. Para perwakilan Koptik di Partai Wafd menolak keras upaya pemerintah untuk membatasi jatah kursi parlemen berdasarkan agama. Mereka menganggap bahwa konstitusi harus menjamin kesetaraan hak bagi rakyat Mesir, baik hak sosial maupun hak berpolitik (Mahmood, 2012:435).

Panasnya kontestasi politik di Mesir berlanjut ketika revolusi 1952 berhasil menggulingkan Raja Farouq dan mengubah sistem pemerintahan negara menjadi republik. Berbeda dengan revolusi 1919 lalu, partisipasi pemeluk Koptik jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Mereka menarik para wakil Koptik dari kelompok militer yang sebelumnya berhasil mengalahkan Inggris. Di bawah kepemimpinan Nasser, alih-alih mendapat kesetaraan hak sipil dan kebebasan politik yang dijanjikan, pemeluk Koptik dan rakyat Mesir secara umum menghadapi kenyataan rezim yang otoriter dan mengingkari perjanjian yang disampaikan di awal revolusi. Namun, tindakan Nasser tersebut tidak didasari atas sentimen keagamaan, tetapi sebagai hasil dari serangkaian kebijakan sosial ekonomi yang akan mengubah identitas Mesir pasca penjajahan (Mahmood, 2012:435).

Setelah Nasser meninggal di tahun 1970, beberapa kebijakan yang ia keluarkan diperkuat kembali di masa kepemimpinan Sadat dan Mubarak. Jika kebijakan Nasser diselenggarakan sebagai bentuk tanggung jawab atas perlakuannya terhadap identitas Koptik, maka rezim Sadat justru menganggapnya sebagai bentuk polarisasi agama. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Sadat berusaha mematikan kelompok kiri dan memfasilitasi munculnya para ekstremis Islam yang nantinya menjadi boomerang bagi kepemimpinannya. Sadat juga diketahui telah memecat Paus Koptik, Shenouda III dari jabatannya sebagai kepala Gereja Koptik Ortodok di tahun 1981 dan membuangnya ke tempat pengasingan. Namun ketika Mubarak berkuasa, ia kembali dibebaskan. Berbeda dengan Sadat, rezim Mubarak membuat persetujuan dengan pihak gereja yang mengizinkan

Gereja Koptik Ortodok untuk mengontrol kehidupan sosial bagi warga Koptik selama mereka bersedia untuk setia pada presiden dan partainya (*National Democratic Party*). Maka, tidak heran ketika demonstrasi anti Mubarak pecah pada 25 Januari 2011, Shenouda III melarang umat Koptik untuk bergabung dengan para demonstran. Akan tetapi perintah tersebut tidak dihiraukan oleh umat Koptik dan memilih bergabung dengan demonstran untuk menggulingkan rezim Mubarak (Mahmood, 2012:437).

Salah satu konsekuensi buruk dari polarisasi identitas agama yang diterapkan di Mesir adalah meningkatnya jumlah kekerasan sektarian. Lembaga HAM Mesir yang memantau isu kebebasan beragama melaporkan hasil temuannya di 2010, bahwa kekerasan sektarian yang terjadi selama tahun 2008-2010 mencapai 53 kasus. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Menyusul lengsernya Mubarak pada 11 Februari 2011, tidak ada yang bisa menjamin rezim baru mampu mengubah sentimen sektarian ini dan membongkar jaringan besar yang menyulut sentimen antara Muslim dan Koptik. Walaupun revolusi 2011 lalu terdiri dari berbagai golongan, termasuk Muslim dan Koptik, dan tidak mengusung isu sektarian, tetapi umat Koptik banyak menjadi korban penyerangan pasca lengsernya Mubarak dan isu-isu komunal semakin meningkat (Mahmood, 2012:437-438).

Dengan demikian, posisi kelompok minoritas Koptik di Mesir banyak ditentukan oleh sikap penguasa dalam menentukan kebijakannya. Seharusnya, demokrasi yang mereka anut dijadikan landasan dalam bernegara dan mengikat semua kelompok di dalamnya, tanpa memandang identitas mayoritas dan minoritas tanpa ada diskriminasi. Namun, kenyataan demokrasi yang terjadi di Mesir adalah demokrasi ala penguasa. Artinya, bukan penguasa yang tunduk pada asas demokrasi, melainkan demokrasi yang harus mengikuti kehendak penguasa. Hingga saat ini, jumlah pemeluk Koptik di Mesir mencapai 10% dari total populasi penduduk Mesir.

b. Kristen Maronit Lebanon

Sebuah kenyataan menarik mengenai pembagian politik kekuasaan di Lebanon adalah adanya Pakta Nasional tahun 1943. Semua formasi kabinet, kursi parlemen, pemerintahan, dan beberapa posisi yang lain dialokasikan untuk semua sekte yang ada di Lebanon. Pakta ini merupakan perjanjian tidak tertulis yang diprakarsai oleh Prancis, dan disetujui pimpinan Maronit, Bisyr al-Khuri, dan pimpinan Sunni, Riyad al-Sulih. Dalam Pakta Nasional tersebut tertuliskan bahwa presiden harus berasal dari kelompok Kristen Maronit, perdana menteri berasal dari Muslim Sunni, dan juru bicara parlemen berasal dari Muslim Syi'ah (Drysdale and Blake, 1985:197). Sejak runtuhnya kekaisaran Utsmani, Lebanon berada di bawah kekuasaan Prancis. Banyaknya kelompok agama yang ada di Lebanon dipandang sebagai lokasi yang paling strategis di Timur Tengah. Tercatat sebanyak 17 kelompok agama, baik sekte Islam maupun Kristen, berkembang di Lebanon (Quassini, 2012:105).

Di tahun 1944, jumlah Kristen di Lebanon mencapai 53% dan Muslim 46% dari total keseluruhan jumlah penduduk Lebanon. Kristen Maronit, salah satu aliran Kristen Lebanon, menjadi kelompok agama tertinggi dibandingkan kelompok agama lain, yaitu sebesar 29% populasi penduduk (Hourani, 1948:63). Rata-rata pemeluk Maronit bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Mereka memiliki standar hidup yang paling tinggi di antara kelompok lain. Pemeluk Maronit juga mendominasi kelas pebisnis dan borjuis di Beirut. Di sisi lain, hampir semua pemeluk Islam Sunni menjadi penduduk kota yang terpusat di Tripoli, Beirut, dan Saida. Muslim Sunni ini merupakan bagian dari kaum proletar terbaik di daerahnya. Beberapa di antara mereka juga merupakan kelompok borjuis, pekerja profesional, dan memiliki tanah keluarga yang luas. Adapun kelompok Syi'ah, rata-rata mereka adalah petani yang hidup di wilayah selatan dan Baqa'. Populasi mereka juga bisa ditemukan di Saida dan Sur dalam jumlah yang sedikit dan menempati kelas pekerja sosial yang rendah di Beirut (Hourani, 1948:65-66).

Prancis, sebagai pemegang mandat administrasi di Lebanon, menjalankan roda pemerintahan dengan cara mendistribusikan kekuatan politik kepada berbagai kelompok agama di Lebanon. Namun, mereka lebih mengistimewakan kelompok Maronit dibandingkan kelompok-kelompok lainnya, seperti terlihat dalam Pakta Nasional. Prancis juga mengatur agar kursi parlemen dibagi antara Kristen dan Muslim dengan rasio 6:5. Selain itu, kekuatan hak veto presiden melebihi kekuatan undang-undang, sehingga jumlah rasio dalam kursi parlemen akan terjamin dan tidak akan pernah berubah (Quassini, 2012:106). Di bidang pendidikan, sekolah-sekolah lokal sebagian besar di bawah kontrol kelompok Maronit, Ortodok, dan Katolik Yunani. Oleh karenanya, pendidikan di Lebanon pada waktu itu didominasi oleh umat Kristen. Alhasil, jumlah umat Kristen yang terpelajar jauh lebih besar dibandingkan umat Muslim. Mereka juga mendapatkan bentuk pendidikan yang berbeda dengan umat Muslim. Akibatnya, Maronit berperan dominan di bidang ekonomi. Dengan begitu selain mendominasi bidang politik, Maronit juga menjadi kekuatan ekonomi yang menentukan di Lebanon (Hourani, 1948:68).

Fakta inilah yang menyulut perang saudara di Lebanon yang berlangsung selama bertahun-bertahun. Kelompok Muslim yang merasa dirugikan menginginkan sistem politik Lebanon tidak terpaku pada Pakta Nasional 1943 dan tidak lagi dikaitkan dengan komunitas keagamaan. Umat Muslim juga menginginkan keadilan dalam bidang ekonomi yang selama ini banyak dikuasai oleh kelompok Maronit. Tuntutan tersebut tidak bisa dipenuhi oleh pihak Maronit, hingga akhirnya perang saudara pun tidak terhindarkan di tahun 1958 (Drysdale and Blake, 1985:199). Keadaan ini diperburuk dengan ekspansi pengungsi Palestina akibat penjajahan Yahudi. Maka, dapat disimpulkan bahwa kaum Kristen Maronit menempati posisi yang berpengaruh di pemerintahan dan tentu saja menguntungkan eksistensi mereka di Lebanon.

c. Kristen di Sudan

Dalam peta wilayah Timur Tengah, negara Sudan dan negara Afrika Utara lain (selain Mesir) seringkali tidak termasuk di dalamnya. Hingga saat ini belum ada kesepakatan bersama atas batas wilayah yang termasuk dalam kawasan Timur Tengah. Namun, jika melihat pada keanggotaan dalam Liga Arab, maka semua negara Afrika Utara masuk ke dalam kawasan Timur Tengah, tidak terkecuali Sudan. Sejak kemerdekaannya ditahun 1956, Sudan telah dibayang-bayangi konflik komunal antar etnis dan umat beragama. Konflik panjang tersebut berujung pada terpecahnya Sudan ke dalam dua wilayah, yaitu Republik Sudan (penduduk mayoritas Islam) dan Republik Sudan Selatan (penduduk mayoritas Kristen dan kepercayaan lokal) di tahun 2011 (Sorbo dan Abdel Ghaffar, 2013).

Sudan merupakan sebuah negara yang didiami oleh 600 etnis dan bermacam agama, baik agama impor maupun agama lokal. Populasi Sudan terdiri dari 52% penduduk kulit hitam, 39% Arab, 6% Beja (suku yang mendiami Sudan bagian Timur), dan 3% penduduk asing. Sebagian dari penduduk Sudan hidup dalam suku-suku kecil yang memiliki adat dan budaya yang berbeda satu sama lain. Selama beberapa dekade terakhir, suku-suku kecil di Sudan telah banyak yang punah. Beberapa di antara mereka juga banyak yang menyatu dengan suku-suku lain dengan beberapa alasan (Oppong, 2010:44). Dalam hal agama, Sudan menjadi negara di dunia yang paling terdampak oleh konflik yang berhubungan dengan perbedaan agama. Dari total penduduk Sudan, 70% di antaranya adalah pemeluk Islam Sunni, 25% pemeluk kepercayaan lokal, dan 5% pemeluk Kristen (Oppong, 2010:46).

Dalam beberapa catatan sejarah Sudan yang ditulis oleh para ahli, orang Sudan seringkali dibedakan ke dalam dua kelompok berdasarkan wilayah dan ras. Orang Sudan bagian Utara dianggap sebagai ‘oriental’, sementara Sudan bagian Selatan dipandang sebagai wilayah bagi penduduk yang tidak memiliki sejarah. Pandangan ini menumbuhkan stigma bahwa penduduk Sudan Utara adalah ‘orang Arab’, ‘Muslim’, dan ‘orang yang beradab’, sedangkan Sudan Selatan memiliki

stigma ‘orang berkulit hitam’, ‘primitif’, dan ‘tidak beragama’ (Idris, 2005:15). Pemahaman semacam ini juga menjadi salah satu akar penyebab menguatnya sentimen keagamaan dan rasial yang berakibat pada perang saudara di Sudan.

Di masa penjajahan, Inggris justru tetap mempertahankan pandangan akan polarisasi wilayah tersebut. Inggris terus mengembangkan wilayah dengan tanah subur di sekitar sungai Nil di Sudan Utara, tapi mengabaikan wilayah Selatan, Timur, dan Dafur. Dengan keberpihakan ini, kawasan Sudan Utara tampak lebih baik dalam hal pendidikan, terutama penutur Arab dan Muslim, serta memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang menjanjikan. Sebaliknya, Sudan Selatan, dengan mayoritas penduduk non-muslim, jauh tertinggal dari Sudan Utara dalam hal kualitas pendidikan, ekonomi, dan kekuatan politik. Usaha untuk menyatukan wilayah Sudan Utara dan Selatan dilakukan Inggris pada Konferensi Juba 1947 dengan kesepakatan akan persatuan Sudan Utara dan Selatan dalam satu negara independen. Kesepakatan ini pun terealisasi di tahun 1956 ketika Sudan berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, persatuan antara kedua wilayah tersebut tidak mengurangi ketegangan antar kedua pihak, bahkan menjadi babak baru konflik di Sudan (Oppong, 2010:64-65).

Setelah lepas dari belenggu kolonial dan merdeka di tahun 1956, struktur dan institusi negara sepenuhnya berada di bawah kontrol Sudan bagian Utara yang berpenduduk Muslim selaku kelompok mayoritas. Dalam proses pembentukan negara, banyak ditemui aksi kekerasan dan teror oleh militer yang justru disponsori oleh pemerintah. Interpretasi yang eksklusif mengenai sejarah dan identitas Sudan telah diterjemahkan ke dalam kebijakan pemerintah sepanjang tahun 1956, misalnya pendapat dari Kepala Departemen Syariah Sudan yang menekankan bahwa konstitusi Sudan harus merefleksikan nilai keislaman dan tradisi Arab Sudan. Padahal di tahun sebelumnya, 1955, kelompok nasionalis Sudan Selatan telah mengusulkan sistem pemerintahan negara federal yang berlandaskan pada “Afro-Arab” dengan menerima masing-masing perbedaan. Usaha ini justru

berujung pada penangkapan dan hukuman bagi mereka. Fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Sudan seakan telah menjadi sebuah negara Arab Islam yang memiliki misi arabisasi dan islamisasi tanpa peduli akan heterogenitas agama dan suku di dalamnya (Idris, 2005:50).

Dalam konstitusinya, Sudan menjamin kehidupan dan hak penduduk non-muslim, baik dalam hal keamanan beribadah maupun pelayanan sosial serta menyetarakan jumlah pajak tanpa memandang agama dan kepercayaan. Bahkan, pemerintah memperluas pengertian *dhimmi* dengan menambahkan penganut kepercayaan lokal di dalamnya, selain umat Krisren dan Yahudi (*ahl al-kitab*) (Tonnessen and Anne Sofie, 2007:8). Akan tetapi, realita di lapangan aturan pemerintah seringkali tidak berpihak pada kelompok non-muslim dan diskriminatif. Berdasarkan laporan dari Organisasi Hak Asasi Manusia, penerapan kebebasan beragama yang termaktub dalam konstitusi Sudan masih jauh dari kata berhasil (Tonnessen and Anne Sofie, 2007:11). Sebagai buktinya, di tahun 1964 di bawah kepemimpinan rezim militer Ibrahim Abboud, Sudan membatasi aktivitas dan mendeportasi para misionaris Kristen (Oppong, 2010:66).

Beberapa bentuk diskriminasi yang paling banyak dikeluhkan oleh para pemimpin Gereja Kristen di Sudan adalah larangan untuk mengkonsumsi alkohol, pembangunan gereja, dan pembatasan akses media dan pendidikan. Dalam hal larangan alkohol, salah seorang pemeluk Kristen Sudan Selatan yang duduk di Parlemen mengatakan bahwa dalam aturan pemerintah, pemeluk Kristen diperbolehkan untuk meminum alkohol dalam sebuah acara pribadi, tapi tidak untuk memproduksi dan diperjual-belikannya. Namun, kelompok oposisi di pihak Kristen mengklaim jika larangan tersebut masih tidak bisa diterima oleh pemerintah lantaran masih diperbolehkannya mengkonsumsi alkohol. Selain itu, larangan ini juga berimbas pada para pemimpin gereja yang kesulitan mendapatkan *wine* untuk ‘jamuan suci’ dan terpaksa harus membelinya secara ilegal. Oleh karena itu, para pemeluk Kristen berusaha untuk membatalkan aturan tersebut demi ritual peribadatan mereka (Tonnessen and Anne Sofie, 2007:15).

Tidak hanya itu, izin pembangunan gereja juga menjadi keluhan utama bagi umat Kristen di Khartoum. Sejak masa rekonsiliasi, kementerian terkait hanya menerbitkan izin untuk pembangunan tiga gereja. Umat Kristen mengkritik pemerintah yang tidak memberikan tanah yang cukup untuk membangun gereja mereka, tapi dengan mudahnya memberikan tanah untuk pembangunan masjid. Mereka menganggap bahwa pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah di Khartoum tersebut bertujuan agar populasi umat Kristen semakin berkurang dan kembali ke Sudan Selatan (Tonnessen and Anne Sofie, 2007:15). Dalam hal akses media dan pendidikan, umat Kristen juga merasa tidak memiliki akses setara dengan umat Muslim. Seperti dalam siaran radio dan televisi, umat Kristen Sudan hanya diberi waktu penyiaran satu jam dalam seminggu. Jauh berbeda dibandingkan umat Muslim yang memiliki durasi lebih panjang, baik untuk acara pembacaan al-Qur'an, kajian Islam, maupun adzan setiap kali memasuki waktu sholat. Di bidang pendidikan, pemerintah telah menentukan kurikulum nasional berbasis Islam (*the National Islamic Educational Curriculum*) tanpa mempedulikan para siswa non-muslim. Para siswa non-muslim terpaksa mempelajari sejarah Islam, geografi Islam, bahkan mempelajari al-Qur'an (Tonnessen and Anne Sofie, 2007:16).

2. Yahudi Di Timur Tengah

a. Kaum Yahudi di Iraq

Organisasi komunitas Yahudi diresmikan di Irak pada tahun 1931. Komunitas ini diserahkan pada tiga komunitas yang berbeda, yakni komunitas Baghdad, Komunitas Mosul dan juga Komunitas Bashra. (kemudian komunitas Diala, menyusul diresmikan pada tahun 1932). Melalui institusi ini komunitas tersebut memiliki bentuk pemerintahan otonom yang memiliki kebijakan tersendiri. Mayoritas Yahudi di Irak berbicara dengan Bahasa Arab dan memiliki keluarga tetap disana sejak ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu. Mereka tinggal di kota

besar, dan memiliki wilayah perekonomian yang besar pula. Mayoritas kaum Yahudi disana memiliki mata pencaharian sebagai pekerja pabrik, saudagar, dan juga pengusaha. Mereka cukup memiliki pengaruh yang kuat khususnya di kota Baghdad. Di bagian utara negara Iraq, ditemukan juga Yahudi yang berbicara dalam Bahasa Kurdi. Dalam wilayah Kurdi tersebut, kebanyakan orang Yahudi menjadi pedagang dan pengrajin cinderamata. Selain itu, ada juga Yahudi yang tinggal di wilayah Amadia yang merupakan daerah persawahan dan menjadi petani di sana (Hourani, 1947: 104).

Kehidupan mereka di Iraq sangat terjamin. Hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa sekolah Yahudi di sana yang sebagian besar disubsidi oleh pemerintah. Kemudian beberapa dari sekolah tersebut pun telah mencapai standar yang tinggi. Di Iraq, mereka tidak mendapatkan diskriminasi apapun bahkan, pada tahun 1940-an terdapat orang Yahudi, Sasoon Heskail yang berhasil menduduki jabatan di parlemen sebagai menteri keuangan. Ada juga beberapa orang Yahudi yang menjadi pegawai negara dan tentara. Kendati demikian, tetap saja orang Yahudi mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat Arab-Iraq karena faktor agama. Hal itu didukung pula dengan adanya rasa iri terhadap kekuatan ekonomi orang Yahudi. Sikap permusuhan ini berkembang pesat di tahun-tahun terakhir atas konsekuensi dari adanya penolakan Arab terhadap Zionisme (sekte dalam Yahudi). Akan tetapi, jika melihat fakta di lapangan, Yahudi Iraq seperti halnya Yahudi Oriental (Yahudi Timur). Sebagian dari mereka bukan Zionist, tetapi mereka mengakui diri sebagai Arab dan musuh dari Zionisme. Permusuhan itu sangat jelas ketika terdapat insiden yang diikuti oleh runtuhnya gerakan Rasyid Ali di Baghdad pada tahun 1941 (Hourani, 1947: 104).

Pasca kemerdekaan Israel di tahun 1948, eksistensi Yahudi di Iraq jauh berkurang dari 130.000 jiwa menjadi 200-250 jiwa di tahun 1978. Hal ini disebabkan karena teror yang mereka alami dan perampasan properti oleh pihak-pihak anti Yahudi. Komunitas Yahudi yang masih bertahan di Iraq bisa diterima oleh rezim Saddam Hussen. Alih-alih hidup dalam ketenangan, mereka justru

mendapat banyak persekusi akibat sentimen Israel dan Zionisme. Ada dua kejadian yang membuktikan bentuk persekusi yang diterima kelompok Yahudi, yaitu kasus pembunuhan yang menimpa Salim Cohen, seorang pebisnis Yahudi di Basra, di tahun 1977 oleh orang tidak dikenal ketika hendak menyusul istri dan anaknya meninggalkan Iraq. Peristiwa selanjutnya terjadi di tahun 1981, beberapa minggu setelah Israel meledakkan reaktor nuklir Iraq, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang kolonial kepada *sesepeuh* Yahudi ketika membeli rumahnya. Namun, kasus pembunuhan ini tidak pernah selesai dan sang kolonial pun bebas dari jeratan hukum (Gottesman, 1985:305).

Setelah dua peristiwa tersebut, tindakan anti-Yahudi terus berlanjut di tahun-tahun sesudahnya. Kelompok Yahudi tidak lagi bebas untuk meninggalkan Iraq dan bepergian akibat adanya larangan untuk beremigrasi dan pembatasan perjalanan ke luar negeri serta akan kehilangan kewarganegaraan apabila tidak kembali dalam jangka waktu tiga bulan. Di tahun 1983, beberapa pembatasan yang dialami orang Yahudi sedikit berkurang. Mereka juga bisa mendapatkan harta yang telah dibekukan dan menjual properti (Gottesman, 1985:306). Kendati demikian, eksistensi Yahudi di Iraq terus mengalami penyusutan akibat adanya teror dan serangkaian peperangan yang terjadi di Iraq.

b. Kaum Yahudi di Mesir

Yahudi di Mesir berjumlah sekitar 65.000 orang pada tahun 1940-an yang terkonsentrasi di Alexandria dan Kairo. Mereka terbagi atas dua komunitas, yaitu Ortodoks (Rabbanite) dan Karaites yang menerima Injil dan menolak Talmud. Populasi komunitas Karaites sendiri mencapai 5000 jiwa. Yahudi Ortodoks terbagi lagi menjadi dua komunitas yang dibedakan berdasarkan wilayahnya yaitu Cairo dan Alexandria yang keduanya memiliki Rabbi tersendiri (Hourani, 1947: 49).

Di Mesir, orang-orang Yahudi berkomunikasi sehari-hari dengan menggunakan Bahasa Arab. Mereka memiliki posisi yang unik dalam kehidupan

ekonomi mereka. Ada yang menjadi ahli ekonom, pengrajin, dan kasir. Untuk kalangan keluarga Yahudi terpandang, mereka lebih tertarik terjun di usaha perbankan. Sebagian yang lain tertarik di dunia percetakan karena sebagian besar dari percetakan non-Arab di Mesir adalah milik orang Yahudi. Secara individu, beberapa orang Yahudi juga terjun di bidang pemerintahan, baik sebagai deputi maupun pejabat pengadilan. Namun, secara komunal peran mereka dalam pemerintahan sangat kecil. Hal ini disebabkan sebagian mereka banyak yang masih berstatus sebagai warga negara asing. Mereka diperlakukan secara adil di Mesir dan tidak didiskriminasi. Kendati demikian, tidak bisa dipungkiri adanya sikap ketidaksukaan yang ditunjukkan orang Mesir kepada orang Yahudi karena faktor agama dan ekonomi. Sikap permusuhan terhadap mereka semakin berkembang ketika mulai munculnya kelompok-kelompok Islam seperti *Misr al-Fatat* dan *Ikhwanul Muslimin* (Hourani, 1947: 50).

Awalnya di seluruh wilayah Mesir hanya dua yang difungsikan, tetapi setelah perjanjian Cam Davies pada Maret 1979 dan kembali menjalin hubungan dengan organisasi Yahudi di Israel dan negara lain, kehidupan Yahudi di Mesir menjadi lebih baik. Perjanjian tersebut telah mengubah politik luar negeri Mesir yang sebelumnya sangat membenci Barat dan Israel menjadi bersahabat dengan keduanya. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi kaum Yahudi di Mesir. Sebagai buktinya, di tahun 1981 mereka mendapat dana segar dari *World Sephardi Federation* untuk merenovasi dan merestorasi synagog utama di Kairo. Namun, sesekali mereka juga menjadi target dari serangan teror dari kelompok-kelompok radikal sebagai respon atas penjajahan Palestina (Gottesman, 1985:309). Dengan demikian, keadaan Yahudi di Mesir jauh lebih baik dibandingkan dengan Iraq, baik secara sosial maupun ekonomi. Yahudi Mesir, beserta kelompok minoritas lain seperti Kristen Koptik, juga mendapat jaminan dan perlindungan dari pemerintah dan mendapat hak yang sama sebagai penduduk Mesir yang mayoritas beragama Islam.

c. Kaum Yahudi di Iran

Pada tahun 1979 M, menjadi momen keruntuhan pemerintahan Shah Reza Pahlavi sekaligus momen kemenangan revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini di Iran. Peristiwa tersebut menjadi awal perubahan drastis yang terjadi pada komunitas Yahudi di Iran. Bangsa Yahudi yang telah ada kurang lebih selama 2500 tahun, pada saat itu mengalami penurunan jumlah yang signifikan. Bagi Yahudi yang menetap di Iran, mereka merasakan adanya kekhawatiran tersendiri terkait masa depan mereka di negara yang mulai dipimpin oleh pemerintah Syi'ah tersebut. Bangsa Yahudi dan non-muslim lainnya diperlakukan sebagai masyarakat kelas dua. Rezim Khumaini secara tegas memusuhi Israel dan Yahudi dengan melakukan aksi diskriminatif terhadap mereka. Hal itu sengaja dilakukan untuk menunjukkan bahwa revolusi Iran yang terjadi saat itu telah merubah Iran sebagai negara yang tidak memungkinkan bagi bangsa Yahudi untuk menjalani kehidupan di dalamnya.

Pada akhir masa pemerintahan Shah Pahlevi, Yahudi diperkirakan berjumlah 80.000 jiwa, dengan perincian 60.000 jiwa bertempat tinggal di Teheran, 8.500 jiwa di Shiraz, 3.500 jiwa di Isfahan, dan yang lainnya tersebar di beberapa kota dan desa yang lain. Kehidupan bangsa Yahudi pada waktu itu terjamin; pendidikan, kebudayaan dan pekerjaan mayoritas dikuasai oleh organisasi Yahudi, termasuk diantaranya adalah *the American Jewish Joint Distribution Committee*, *Lubavitch Movement*, *Ozar Hatorah*, dan *the Alliance Israelite Universelle*. Lebih dari 11.000 anak dari komunitas Yahudi terdaftar di 23 sekolah di Iran. Selain itu, sejumlah 11.000 dari komunitas Yahudi lainnya terdaftar di sekolah dan Universitas Iran. Komunitas Yahudi memiliki presentase tertinggi jika dibandingkan dengan kelompok etnik lain di sekolah maupun di universitas. Pada saat itu, mereka memiliki kebebasan bergerak secara penuh; kemudian, pada tahun 1948, sebanyak 62.000 orang Yahudi Iran telah melakukan emigrasi ke Israel. Standar kehidupan mereka berkembang dengan baik. Bahkan, mereka memiliki

kesempatan untuk masuk dalam pemerintahan. Selain negara Turki, Iran merupakan satu-satunya negara muslim yang memiliki hubungan baik dengan Israel kala itu. Dibuktikan dengan adanya rute penerbangan Teheran-Lod yang disediakan oleh perusahaan penerbangan di Iran.

Berbeda halnya pada masa Ayatullah Khumaini, yang terkenal dengan pandangan anti-zionisnya. Pada awal kemenangannya, secara mengejutkan Khumaini mengeluarkan *statement* yang menentramkan hati komunitas Yahudi. Khomeini mengatakan kepada wakil Yahudi Amerika: “Yahudi di Iran akan memiliki hak dan perlindungan penuh dari pemerintah, begitu juga dengan kelompok minoritas yang lain serta tidak perlu khawatir terhadap masa depan mereka.” Para Rabbi Yahudi pun melakukan pertemuan dengan Khumaini. Pada saat melakukan pertemuan, mereka meminta agar agama minoritas diperlakukan secara sama dengan agama mayoritas, dalam kasus ini adalah Islam. Akan tetapi, Pada saat itu pula, Khumaini menyatakan kembali maksudnya untuk memutuskan hubungan dengan Israel dikarenakan Israel sendiri belum mendapatkan pengakuan secara resmi tentang keeksistensiannya sebagai sebuah negara. Ia mengatakan bahwa “Palestina adalah milik dunia Islam, yang harus dikembalikan ke orang Islam.”

Pada hakikatnya, langkah untuk memutuskan hubungan diplomatic dengan Israel adalah aksi utama dari yang utama pada masa rezim Khumaini. Dalam masa pemerintahannya pernah terjadi peristiwa dimana terdapat beberapa demonstran yang masuk ke gedung kedutaan Israel yang tidak resmi di Teheran, mereka melakukan penggeledahan, kemudian mengibarkan spanduk PLO di dinding gedung tersebut. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa gedung tersebut telah dipersembahkan kepada pimpinan PLO, Yasser Arafat –Tamu resmi pertama dalam pemerintahan Khumaini- disertai dengan teriakan “*death to Israel*”.

Pada masa awal pertama revolusi Iran, sekitar 15.000 Yahudi Iran melakukan pengungsian ke luar negeri. Setengah dari jumlah tersebut melakukan emigrasi ke Israel. Kemudian, separuhnya lagi melakukan emigrasi ke Eropa barat

dan ke Amerika. Dari sekitar 7.500 Yahudi Iran yang mengungsi ke Israel, hanya 2000 orang yang memilih tinggal secara permanen di Israel. Adapun yang lain mereka masih menunggu situasi yang lebih aman di Iran dan masih berharap untuk kembali.

Pada bulan Mei 1979 Habib el-Ghanian, pengusaha Yahudi terkemuka dan merupakan mantan presiden dari *Anjoman kalimian*, yaitu sebuah organisasi yang memayungi komunitas Yahudi Iran yang disahkan sesuai dengan perintah dari pengadilan revolusioner. Pada saat itu, El-Ghanian dituduh sebagai mata-mata dari Israel dan melakukan tindak korupsi. Bukan hanya itu, Pada tahun-tahun selanjutnya, sekitar sepuluh orang Yahudi yang lain dituduh dengan tuduhan yang bermacam-macam. Termasuk dituduh sebagai mata-mata Amerika Serikat dan Israel, Zionis, pengedar narkoba, korupsi, dan penganut aliran sesat. Dalam menghadapi adanya tuduhan-tuduhan tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa Israel adalah salah satu tempat berlindung bagi Yahudi Iran ketika mereka berada dalam bahaya dimana terdapat sanak keluarga mereka di sana. Ada juga negara alternatif lainnya yang pernah mereka kunjungi selama rezim Shah Pahlevi.

Pada tahun 1980 an, jumlah orang Yahudi di Iran mengalami penurunan. Pada saat itu diperkirakan jumlah Yahudi sekitar 35.000 jiwa yang mayoritas tinggal di Teheran, sekitar 5.000-7.000 jiwa di Shiraz, 1.600-2.000 di Isfahan, dan 3.500 tinggal tersebar di kota dan desa lainnya. Semenjak pecah perang dengan Irak pada September 1980, Yahudi yang hidup di wilayah konflik dilaporkan terlihat di tempat pengungsian yang aman sementara orang Yahudi yang termasuk *upper class* telah melarikan diri keluar Iran dengan kondisi tanah/saham miliknya disita oleh negara.

Berdasar pada apa yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa komunitas Yahudi di Iran pada masa pemerintahan Ayatollah Khomeini mengalami kesulitan. Banyak tuduhan-tuduhan negatif yang ditujukan kepada mereka. Tuduhan tersebut bermacam-macam, di antaranya adalah tuduhan sebagai mata-

mata Israel dan AS, koruptor, pengedar narkoba dan penganut agama sesat. Kondisi ini berbeda dari masa pemerintahan Shah Pahlevi sebelumnya, dimana mereka memiliki kebebasan untuk bergerak. Hal ini pula yang menyebabkan mereka melakukan pengungsian ke Israel, Eropa Barat, dan Amerika Serikat. Sehingga jumlah orang Yahudi pada saat itu mengalami penurunan yang signifikan. (Gottesman, 1985: 318-320)

D. SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik empat kesimpulan penting. *Pertama*, eksistensi non-muslim di Timur Tengah secara keseluruhan menempati posisi sebagai kelompok minoritas. Hal ini disebabkan oleh sejarah panjang perjalanan Islam yang berhasil menguasai seluruh wilayah Timur Tengah dan diaspora penduduk non-muslim ke Barat. *Kedua*, secara umum kelompok non-muslim di Timur Tengah mampu hidup berdampingan dengan baik bersama kelompok mayoritas. Hanya saja, dalam situasi tertentu kelompok minoritas seringkali menjadi sasaran beberapa aksi teror, seperti pembunuhan dan penyerangan rumah ibadah.

Ketiga, dilihat dari hak yang diterima oleh kelompok non-muslim di Timur Tengah sebagai warga negara, tercatat hanya kelompok Kristen Sudan, Komunitas Yahudi di Iraq dan Iran yang tidak menerima hak semestinya dan mendapat perlakuan yang diskriminatif. Dalam kasus Kristen Sudan, kebijakan pemerintah yang represif dan usahanya untuk melenyapkan homogenitas agama dan suku di negaranya menjadi faktor penyebabnya. Adapun kelompok Yahudi di Iraq banyak kehilangan haknya dikarenakan sentimen negatif kepada mereka sebagai akibat dari kemerdekaan Israel di tanah Palestina. Berbeda halnya dengan Yahudi di Iran pada masa pemerintahan Ayatullah Khomeini. Meskipun dalam aturan tertulis negara, dinyatakan bahwa pemerintah melindungi kaum minoritas Yahudi, tetapi pada kenyataannya kelompok Yahudi sering mendapat tuduhan negatif dari pemerintah, seperti tuduhan korupsi, pengedar narkoba, dan lain sebagainya.

Keempat, secara politik, tercatat hanya kelompok Koptik Mesir dan Kristen Sudan yang mendapatkan perlakuan diskriminasi dari pemerintah, baik akses politik maupun porsi di parlemen. Berbeda halnya dengan kelompok non-muslim di Lebanon, Iraq, dan Iran (di masa pemerintahan Reza Pahlevi) yang mendapat perlakuan setara dengan kelompok mayoritas, bahkan mampu menempati jabatan eksekutif negara. Dengan demikian, aktor yang berkuasa di pemerintahan negara cukup berpengaruh terhadap eksistensi dan status sosial non-muslim di Timur Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Barakat, Halim. 2012. *Dunia Arab Masyarakat, Budaya dan Negara*. Terj: Irfan M/Zakkie. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Belge, Ceren and Ekrem Karakoc. 2013. *Minorities in The Middle East: Ethnicity, Religion, and Support for Authoritarianism*. Jurnal "Political Research Quarterly" Vol. 68 (2) 280-292.
- Drysdale, Alasdai dan Gerald H. Blake. 1985. *The Middle East and North Africa: A Political Geography*. New York: Oxford University.
- Hendropriyono, A.M. 2009. *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Kompas.
- Hourani, A. H. 1947. *Minorities In The Arab World*. Edinburgh: Oxford University Press.
- Idris, Amir. 2005. *Conflict and Politics of Identity in Sudan*. New York: Palgrave Macmillan.
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: LKiS.
- Mahmood, Saba. 2012. *Religious Freedom, The Minority, Question, and Geopolitics in The Middle East*. Jurnal "Comparative Studies in Society and History" Vol. 54(2) 418-446.
- Oppong, Joseph R. 2010. *Modern World Nations: Sudan*. New York: Chelsea House Publisher.
- Quessini, Nabil and Arvind Verma. 2012. *Policing Muslim Communities: Comparative International Context*. New York: Springer Science and Bussines Media.
- Sorbo, M. and Abdel Ghaffar M. eds. 2013. *Sudan Divided: Continuing Conflict in a Contested State*. Basingtoke: Palgrave Macmillan.

Tonnessen, Liv and Anne Sofie Roald. 2007. *Discrimination in the Name of Religious Freedom: The Rights of Women and Non-muslims after the Comprehensive Peace Agreement in Sudan*. CHR. Michelsen Institute Report.